PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027



RENJA 2027

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2027

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Koordinator Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan,	Petugas Verifikator,
EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM	TAUFAN RINALDI
NIP. 198311182002122001	NIP. 199707072020081003

Mengetahui,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Dr. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720324 199203 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anggaran dalam sub kegiatan Tahun 2027, sebagai upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah,terutama apabila dilakukan review atas Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731020 199903 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI.....iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 6
1.3. Maksud dan Tujuan 9
1.4. Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH.....10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 22
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.....35
2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD 38
2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD 39
2.6. Inovasi Perangkat Daerah 53

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....54

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....54
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah.....58

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 124

4.1. Program dan Kegiatan 124

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 131

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 131
5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 132

BAB VI PENUTUP 135

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 Kabupaten Temanggung 11

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung..... 23

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggung..... 25

Tabel 2.6. Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025 37

Tabel 2.7. *Review* terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027 39

Tabel 2.8. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2023-2026..... 53

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 55

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027 59

Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027 125

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 131

Tabel 5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027..... 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

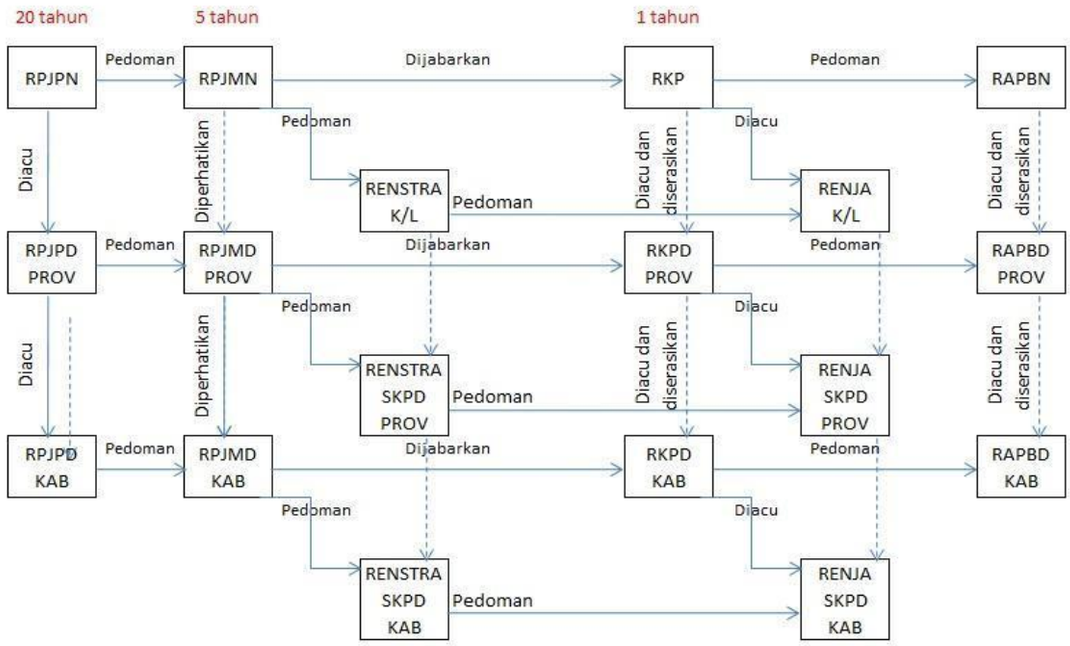
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2027 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2027.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat Daerah, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat Daerah, yang menyangkut aspek:

1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah;
2) Kondisi pelayanan Sekretariat Daerah;
3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah;
4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat Daerah;
5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat Daerah;
6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;dan
7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat Daerah untuk kondisi tahun 2025-2029;
4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, dan realisasi tahun 2026 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2025;
5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat Daerah.

c. Me*review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

   Me*review* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
4) Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025;
5) Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat Daerah;
3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat Daerah;
4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's *(Sustainable Developmnet Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta

pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan

kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, ikliminvestasi dan iklimusaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat Daerah perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat Daerah yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor39 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepatsasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama kurun waktu Tahun 2027;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2027; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam melakukan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2026. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun berjalan terhadap target yang telah ditentukan.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan dengan menggunakan capaian kinerja Tahun 2025yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029. Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026
Kabupaten Temanggung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2026				
				Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Target Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d TW1 2026		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							K	Rp (DPA)	K	Rp	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7= 6/5*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=10/8*
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
4.01	**Sekretariat Daerah**										
	Bagian Pemerintahan										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	112.500.000	25	6.814.000	25
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	**%**	100	100	100	100		25		25
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		dokumen	30	30	100	30	105.000.000	12	6.814.000	40
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	dokumen	12	12	100	12	5.000.000	3		25
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	dokumen	12	12	100	12	10.000.000	3	270.000	25
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	dokumen	6	6	100	6	90.000.000	6	6.544.000	100
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		dokumen	12	12	100	12	7.500.000	3		25
4.01.02.2.04.0001	Fasiilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	12	12	100	12	7.500.000	3		25

	Bagian Kesra dan Bina Mental										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik.	%	87,84	87,84	100	88	29.249.975.350	87,84		
		Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	80	80	100	80		40		
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	4	4	100	4	29.249.975.350			
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	2	2	100	2	125.000.000	0,40	87.405.700	20
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1	100	1	27.865.315.000			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	Dokumen	1	1	100	1	1.259.660.350	0,25	350.660.224	25
	Bagian Hukum										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persenta secakupan bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	456.000.000	100		100
		Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Non Litigasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum secara Litigasi	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Dokumentasi Perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100		100		100
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							456.000.000			

4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	Dokumen	111	68	100	100	25.000.000	36	1.638.000	36
4.01.02.2.03.0002	FasilitasiBantuan Hukum	Jumlah penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi dan litigasi	Kasus	30	28	100	30	416.000.000	6	5.719.297	20
		Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Dokumen		22	100					
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perundangan yang Didokumentasikan melalui JDIH	Dokumen	111	68	100	100	15.000.000	12	9.343.406	12
	Bagian Pembangunan										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	100	100		3,22		3,22
		Persentase pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	100		96,12		96,12
		Persentase capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	95	95	100	100		100		100
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Laporan	12	12	100	12	34.151.700	3	5.625.000	25
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	100	1	10.348.000	0,25	1.460.000	25
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan	4	4	100	4	23.803.700	1	4.165.000	25
	Bagian Perekonomian										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	96,99	96,99	100		25		
		Persentase jaminan keamanan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100		25		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	100	83,33		66,67		
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi Monitoring, dan Evalusai Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	JumlahDokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4	100	4	50.000.000	1	6.130.200	25
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	5	5	100	5	450.000.000	2	26.226.456	40
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan										

	Sumber Daya Alam										
	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Laporan	2	2	100	2	26.250.000	1	3.750.000	50
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa										
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100		100		100
		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	95	100	100	95		1,16		1
		Persentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100		100		100
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	10	14	100	6323	6.000.000	188		3
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3000	3108	100	700	15.000.000	232	2.322.351	33
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang dan atau Perangkat Daerah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa	Orang	103	103	100	103	2.695.050	103		100
	Bagian Umum										
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	75,35	75,35	100	76	15.600.203.335	75,35	4.139.551.298	99,14
		Presentase Pemenuhan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	9.571.654.795	32,14	1.192.558.945	32,14
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kedinasan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	1.801.029.937	100	182.523.000	100
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Th	1876	1876	100	1876	15.422.665.708	532	4.089.937.842	28,35
4.01.01.2.11	AdministrasiKeuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	Orang	22	22	100	28	177.537.627	8	49.613.45	28,5

	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								6	7
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	50	50	100	50	300.000.000	10		20
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	100	2	40.000.000			
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	95.000.000	3	-	25
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	115.900.000	3	-	25
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	266.000.000	3	690.631	25
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	228	228	100	228	38.000.000	57	4.042.000	25
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	12	12	100	12	1.300.000.000	3	98.191.550	25
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	12	12	100	12	380.000.000	3	71.775.502	25
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit								
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2	100	1	1.253.411.200	-	-	0
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket								
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang Disediakan	Unit	12	12	100	12				
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa										

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	12	9.500.000	3		25
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	1.094.868.750	3	241.050.959	25
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100	12	3.055.069.845	3	740.960.504	12
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28	28	100	28	237.500.000	7	12.311.299	25
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	100	20	712.500.000	5	23.536.500	25
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	12	100	12	47.500.000	3		25
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100	12	47.500.000	3		25
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100	1	18.905.000			
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	72	72	100	72	900.000.000	3		25
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	300.000.000	3	49.948.800	25
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	282.000.000	3	46.978.000	25
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12	12	100	12	879.029.937	3	85.596.200	25

	Sekretariat Daerah										
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kepala Daerah yang Terlayani	%	100	100	100	100		100		
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Opersional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	192	392	100	192		62		
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	500	1093	100	500	355.359.500	213	12.176.500	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Sosial,	Laporan	2000	2231	100	2000	1.067.250.000	410	73.499.300	
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	800	982	100	800	208.949.100	172		
	Bagian Organisasi										
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	3,77	4,04	100	3,8		4.04		100
		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100	100	100		100		100
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi										
4.01.01.2.13.0001	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2	100	2	50.000.000	1	2.152.517	50
4.01.01.2.13.0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Kooordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah	Dokumen	2	2	100	2	19343750			

	Kinerja Pemerintah Daerah	Daerah									
4.01.01.2.13.0003	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	2	100	2	10.000.000	1	3.166.500	50

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Dari Tabel 2.1. evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah berupa:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

   a. Administrasi Tata Pemerintahan
   b. Fasilitasi Kerjasama Daerah
   c. PelaksanaanKebijakanKesejahteraan Rakyat
   d. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

   Program Perekonomian dan Pembangunan

   e. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
   f. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
   g. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   i. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   j. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   k. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   l. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   m. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
   n. Penataan Organisasi

2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerjahasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

   Program Perekonomian dan Pembangunan

   a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
   b. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

   a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Indikator : Indeks Zakat Nasional
   b. Program Perekonomian dan Pembangunan, indikator : Presentase ketersediaan produk barang bersubsidi, Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu, dan Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi

4. Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
   a. Faktor penyebab tidak tercapai:
      - indikator Indeks Zakat Nasional yang merupakan indikator baru (mandatori) baik target maupun penilaiannya dari Baznas pusat
      - Agen/Pangkalan BBM dan LPG tidak melaporkan stok
      - Perangkat Daerah terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru
      - Kelengkapan dokumen kontrak yang diajukan belum optimal, serta adanya perubahan regulasi.
   b. Faktor penyebab melebihi target :
      - Meningkatnya koordinasi dengan OPD dan pemahaman OPD terhadap pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
      - Terlaksananya agenda kegiatan pimpinan daerah karena meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:
   - capaian program tersebut merupakan kegiatan adminstrasi/rutin yang dapat tercapai di akhir tahun 2026.
   - Adanya kesesuaian realisasi dengan target, adapun indikator yang akan mencapai target terdapat pada indikator program :

   Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
   a. Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik
   b. Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti
   c. Persentase produk hukum yang difasilitasi
   d. Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH
   e. Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi
   f. Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi
   g. Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin
   h. Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi
   i. Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik
   j. Indeks Zakat Nasional

   Program Perekonomian dan Pembangunan

k. Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi
l. Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan
m. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP
n. Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah
o. Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi
p. Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu
q. Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan
r. Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
s. Presentase Pendampingan proses PBJ

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

t. Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan
u. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
v. Nilai AKIP Sekretariat Daerah
w. Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
x. Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah
y. Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
   a. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu.
   b. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025, maka dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ***Sangat Tinggi*** yaitu dengan nilai **99,22%.** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Kebijakan
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
   Capaian Kinerja: 95,60% kategori Sangat Tinggi
4. Indeks Reformasi Hukum
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
5. Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
6. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
   Capaian Kinerja: 97,95% kategori Sangat Tinggi
7. Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
   Capaian Kinerja : 100% kategori Sangat Tinggi
8. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
9. Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB
   Capaian Kinerja: 100% kategori Sangat Tinggi
10. Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah
    Capaian Kinerja:100% kategori Sangat Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerahdibagi menjadi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kunci. Adapaun penjelasan masing-masing indikator tercantum pada tabel 2.2 -2.5 sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
INDIKATOR KINERJA UTAMA									
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	65	66	67	75,71	75,71	100	ST
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	66,5	67,5	68,5	67,37	67,37	99,81	ST
3	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Angka	84,35	84,50	84,55	84,35	84,35	99,82	ST
4	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
5	Persentase AKIP Perangkat daerah berpredikat BB	%	75,35	76	76,25	84,78	84,78	100	ST
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Angka	-	81,25	81,5	86,22	86,22	100	ST
7	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100	100	100	100	100	ST
8	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,434	3,46	3,47	3,2983	3,2983	95,33	ST
9	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,88	97,08	97,18	97,12	97,12	100	ST
10	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,82	3,93	3,97	3,82	3,82	97,20	ST
INDIKATOR PROGRAM									
1	Persentaseadministrasi tata kelolapemerintahan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	ST
2	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	ST
3	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
4	Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100	100	100	100	100	ST
5	Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
6	Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi	%	100	100	100	100	100	100	ST
7	Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	ST
8	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80	80	80	40	50	SR
9	Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	87,84	88	89	87,84	87,84	99,82	ST
10	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,81	0,81	0,82	0,8	0,53	65,43	R
11	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	ST
12	Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	ST
13	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33	83,33	83,33	66,67	80	T
14	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST
15	Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100	100	75,58	3,22	3,22	SR
16	Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100	100	73,79	96,12	96,12	ST
17	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	100	100	100	100	100	ST
18	Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	90	95	100	100	1,16	1,22	SR
19	Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100	100	100	100	100	ST
20	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100	100	100	100	100	ST
21	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,77	3,8	3,9	4,04	4,04	100	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
22	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Angka	75,35	76	76,25	75,35	75,35	99,14	ST
23	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	32,14	32,14	SR
24	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST
25	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	ST

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah (IKK) Kabupaten Temanggungp

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
Sekretariat Daerah									
INDIKATOR IKK (RPJMD 2025-2029)									
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	70	75	80	97,44	59,9*	59,9*	T
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	29	30	31	28,74	59,74*	59,74*	T
3	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	%	-25	10	15	50,2	81,1*	81,1*	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		Capaians.dtw 1 2026	Skala Nilai Peringkat Kinerja (ST/T/SEDANG/R/SR)
			2025	2026	2027	2025	2026		
INDIKATOR IKK (Kepmendagri.....)									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Bobot	n.a	20	22	n.a	10	10	S
2	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Bobot	n.a	24	24	n.a	24	24	ST
3	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Bobot	n.a	24	24	n.a	24	24	ST

Sumber: Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026
*Keterangan: * masih memakai capaian tahun 2025*

Adapun penjelasan untuk masing masingi ndikator adalah sebagai berikut:

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjut
A	**Tujuan**					
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien	1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	Adanya tindaklanjut yang telah dilakukan dari evaluasi tahun sebelumnya	Belum ada reward dan/atau punishment atas hasil evaluasi AKIP internal	Menerapkan kebijakan reward dan/atau punishment yang telah disusun
		2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Hasil evaluasi kualitas kebijakan publik, melalui penilaian pada dimensi Perencanaan Kebijakan (20%), Implementasi Kebijakan (25%), Evaluasi & Keberlanjutan Kebijakan (30), serta Transparansi & Partisipasi publik (15%), dan profiling penilaian (10%)	Dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatnya konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki	Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan belum dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun penyusunan kebijakan	Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analis Kebijakan untuk melakuk ananalisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan
B	**Sasaran**					
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Akumulasi dari penilaian terhadap variable indeks capaian kinerja	Terjaga sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan selaku sekretariat IKK LPPD dengan OPD pengampu	a. Beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) belum bias tercapai 100% karena terdapat kendala internal pada OPD pengampu IKK. b. OPD belum mampu secara maksimal memenuhi kriteria dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman penyusunan LPPD	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri serta provinsi terkait dengan penyelarasan rumus Indikator Kinerja Kunci (IKK). Melakukan evaluasi secara berkala dengan OPD yang capaian rendah didampingi inspektorat kabupaten sebagai APIP
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Hasil penilaian IRH yang dilakukan oleh Kementerian Hukum	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Penilaian baru keluar pada bulan November	Dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap kegiatan yang menjadi indicator penilaian

	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual	Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan dan bina mental spiritual dibagi jumlah rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bidang pemerintahan bina mental spiritual yang disusun dikali 100%	Adanya dukungan untuk membuat rumus akan kebijakan	Perubahan kebijakan	Koordinasi dengan pimpinan
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi dibagi Jumlah Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dikali 100%	1. Karena menjadi salah satusyarat dan kelengkapanpencairan GU 2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	1. Kurang tertibnya admin dalam input data ke laporan setiap bulan 2. Ketidaksesuain data	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
	Meningkatnya Kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/ Kota	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	$IKAD_m = \left(\sum_{i=1} a_i Z_{im}\right) \times 10$ Di mana a1 merupakan bobot dari masing-masing indikator dalam dimensi penggunaan yang telah disesuaikan menjadi skala. Data dan perhitungan IKAD dilakukan secara nasional dan terpusat, bukan oleh daerah. Daerah menerima pembaruan data setiap periode tertentu	Permasalahan aduan barang bersubsidi yang dapat terselesaikan dengan koordinasi	Aduan tidak disampaikan secara tertulis dan tidak disertai bukti dukung	Menghimbau agar aduan disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Total ITKP = Bobot (SDM) + Bobot (PemanfaatanSistem) + Bobot (E-Tendering) + Bobot (E-Purchasing) + Bobot (Non e-Tendering/e-Purchasing) + Bobot (E-Contract) + Bobot (Kematangan UKPBJ) Keterangan: ITKP hasilpenilaian yang dikeluarkan oleh LKPP RI	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%),	Laporan kinerja yang secara umum telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian	Pada saat evaluasi dilaksanakan, implementasi SAKIP masih menggunakan Renstra tahun 2024-2026	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi AKIP dari APIP Pemda

			pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah, dengan menghitung Jumlah PD yang berrediat BB atau diatasnya dibagi Jumlah PD dikali 100%	kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan	sehingga tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya belum seluruhnya dapat dilaksanakan	
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah	IKM Sekretariat Daerah	Nilai IKM diambl rata-rata hasil SKM Bagian. Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus IKM = SKM x 25	Adanya system pelayanan online dan sarana prasarana pendukung layanan	Penilaian IKM belum dapat dilaksanakan di triwulan 1 dan masih menggunakan nilai tahun 2025, karena masih menunggu aplikasi dan jadwal dari kemenpan dan rekapitulasi penilaian dilaksanakan di TW IV	Melaksanakan koordinasi dengan 9 bagian di Setda secara rutin, Peningkatan kapasitas SDM pelayanan, dan peningkatan sarana prasarana yang belum memenuhi standar

B. INDIKATOR PROGRAM

No	Program	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjut
A	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**					
1	Terlaksananya kegiatan keagamaan, fasilitasi rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi dibagi jumlah kegiatan keagamaan yang ada dikali 100%	Sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan	Adanya perubahan kebijakan	Melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan
2		Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan keseluruhan dikali 100%	Sudah terjadwalnya kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan	Adanya perubahan kebijakan	Melaksanakan peringatan kegiatan keagamaan
3	Meningkatnya kinerja pengelolaan zakat	Indeks Zakat Nasional	Indeks Zakat Nasional (IZN) = 0,30X1 + 0,70X2 Keterangan : X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)	Sudah adanya Perda	1. Perda Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan 2. Dukungan APBD Tahun 2025 belum ada	Koordinasi dengan pimpinan
4	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Presentase administrasi tata pemerintahan yang baik	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang terdata dibagi jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang ada dikali 100%	Terjadi sinergitas yang baik antara Bagian Pemerintahan dengan stakeholder terkait	Lambatnya respon dan pengumpulan dokumen adminsitrasi tata pemerintahan	Bagian Pemerintahan melakukan koordinasi secara berkaladengan stakeholder
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Kerja Sama	persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	Jumlah Kerja Sama yang ditindaklanjuti dan	a. Mendukung pelaksanaan program KKN di	Kurang optimalnya koordinasi	Mengoptimalkan koordinasi Tim Koordinasi Kerja

	Dalam Negeri		diimplementasikan dibagi jumlah kerja sama yang dilakukan dikali 100%	Kabupaten temanggung b. mendukung akreditasi perguruan tinggi	internal Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)	Sama Daerah (TKKSD)
6	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan di bidang Hukum	Persentase produk hukum yang difasilitasi	jumlah produk hukum yang difasilitasi dibagi jumlah produk hukum yang diajukan dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya propemperda dan propemperkada sesuai waktu pelaksanaan yang telah disusun
7		Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	jumlah perundangan yang didokumentasikan melalui JDIH dibagi jumlah perundangan yang dibuat dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah pengusul produk hukum dengan Bagian Hukum selaku fasilitator dalam penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya pendokumentasian produk hukum daerah melalui JDIH
8		Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara non litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara non litigasi dikali 100%	Terjaganya sinergitas yang baik antara bagian hukum, OPD terkait, dan anggota Forkompida Kab. Temanggung sehinggamemper mudah pelaksanaan mediasi dan pencarian jalan keluar	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hokum secara non litigasi di Kabupaten Temanggung
9		Persentase penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi	Jumlah permasalahan hukum yang diselesaikan secara litigasi dibagi jumlah permasalahan hukum yang masuk secara litigasi dikali 100%	Integritas yang tinggi serta terjaganya sinergitas yang baik dengan lembaga penegak hukum	Kurangnya kuantitas pegawai di Bagian Hukum	Optimalisasi penyelesaian permasalahan hokum secara litigasi di Kabupaten Temanggung
10		Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan dibagi jumlah bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang masuk dikali 100%	Komitmen yang tinggi dari pelaksana kegiatan serta evaluasi kegiatan dari pimpinan	Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga belum bisa melingkupi masyarakat miskin secara keseluruhan	Optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung
B	**Program Perekonomian dan Pembangunan**					
11	Meningkatnya kinerja kegiatan administrasi pembangunan	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	Realisasi fisik kegiatan seluruh Perangkat Daerah dibagi target fisik kegiatan seluruh perangkat daerah dikali 100%	1. APBD ditetapkan tepat waktu 2. Kesiapan Tim Pelaksana	PD terlambat input dan yang diinput bukan data terbaru	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
12		Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	Jumlah dokumen kontrak yang diverifikasi dibagi jumlah keseluruhan dokumen kontrak yang harus diverifikasi dikali 100%	Dokumen kontrak menjadi syarat pencairan	1. Efisiensi anggaran menyebabkan pekerjaan yang sudah dilelang tidak dilanjutkan kontraknya; 2. Triwulan 1 sebagian besar pekerjaan belum dimulai.	1. Koordinasi internal dan eksternal 2. Penetapan target yang realistis 3. Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan 4. Monitoring paket pekerjaan

						fisik 5. Perencanaan diusahakan N-1 dan Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dan juga pembinaan terhadap konsultan pengawas.
13		Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	Jumlah PD (unit kerja) yang menyampaikan laporan tepat waktu dibagi Jumlah PD (unit kerja) dikali 100%	1. Karena menjadi salah satu syarat dan kelengkapan pencairan GU 2. Tertib pelaporan administrasi dan keuangan	1. Kurang tertibnya admin dalam input data kelaporansetiapb ulan 2. Ketidaksesuain data	1. Tertib pelaporan 2. Evaluasi pelaporan 3. Admin baru segera menyesuaikan 4. Koordinasi dengan PD terkait
14	Terselenggaranya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	Total nilai pagu pengadaan barang/jasa yang terumumkan pada SIRUP dibagi Total nilai pagu anggaran APBD Pengadaan barnag/jasa dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	- Kinerja OPD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi Rencana Umum Pengadaan - Persiapan perencanaan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
15		Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaanbarang/jasa	Jumlah paket pengadaan barang/jasa non e-Procurement yang sudah dicatatkan pada SPSE dibagi jumlah keseluruhan paket pengadaan barang/jasa dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
16		Presentase Pendampingan proses PBJ	Jumlah Perangkat Daerah dibagi jumlah pendampingan yang dilaksanakan dikali 100	Membuat Surat Edaran Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025	Pemenuhan tenaga ASN yang kompeten dan profesional di UKPBJ belum terpenuhi, terutama bagi tenaga ahli pengadaan barang/jasa yang bersertifikasi.	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 050/12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025
17	Meningkatnya pengelolaan bidang perekonomian	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	Jumlah realisasi ketersediaan barang bersubsidi/Jumlah kebutuhan barang bersubsidi dikali 100%			
18		Persentasel aporan permasalahan barang bersubsidi	Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi	Permasalahan aduan barang bersubsidi yang	Aduan tidak disampaikan secara tertulis	Menghimbau agar aduan disampaikan

		yang terselesaikan	yang terselesaikan/ Jumlah laporan permasalahan barang bersubsidi dikali 100%	dapat terselesaikan dengan koordinasi	dan tidak disertai bukti dukung	secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen/ bukti pendukung
19		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Jumlah BUMD dengan opini WTP/Jumlah BUMD dikali 100%	Pembinaan dan Evaluasi BUMD yang dilaksanakansecara rutin	Pemeriksaan KAP atas laporan keuangan BUMD dilakukan dalam satu tahun anggaran dan dilaksanakan pada awal tahun berikutnya, sehingga pada saat pelaporan triwulanan belum dapat diketahui gambaran opini laporan keuangan BUMD	Melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama dengan Tim Pembina dan Dewan Pengawas
c	**Program PenunjangUrusanPemerintahanKabupaten/Kota**					
20	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung yang terpenuhi dibagi jumlah Laporan Keuangan, umum, dan jasa penunjang Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dikali 100 %	Kewajiban untuk mengirimkan dokumen perencanaan, laporan keuangan,laporan kinerja, penilaian terhadap tertib administrasi umum dan terpenuhinya jasa penunjang perangkat daerah secara benar dan tepat waktu antara lain Laporan Keuangan Januari, Februari, Maret 2026, CALK 2025, Dokumen LKJIP 2025, PK 2026, Rencanaaksi, SKP, Evaluasi TW I	- Adanya perubahan kebijakan maupun kebijakan baru yang belum dapat diterapkan secaramaksimal - aplikasi yang sering maintenance - belum semua aplikasi terintegrasi - merupakan kegiatan rutin tiap bulan sehingga target akan tercapai pada triwulan IV	Meningkatkan koordinasi dan kemampuan SDM, Koordinasi antar bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait secara intensif
21	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasiatas 4 komponenyaituperencanaankinerja (30%) pengukurankinerja (30%), pelaporankinerja (15%), evaluasiakuntabilitaskinerja internal (25%) pada Sekretariat Daerah	Adanya komitmen dalam memanajamen kinerja	- pohon kinerja dan penjenjangan kinerja belum sesuai dengan kaidah, serta cascading di Renstra sebelumnya belum linier - Penilaian masih menggunakan nilai tahun 2025 karena penilaian sakip di tahun 2026 belum dilaksanakan	- Menyusun pohon kinerja, penjenjangan kinerja serta cascading sesuai ketentuan dalam Penyusunan Renstra 2025-2029 - Melaksanakan evaluasi atas isu strategis, tujuan, sasaran, outcome dan output melalui penjenjangan kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan
22	Meningkatnya kebutuhan kedinasan pimpinan daerah yang terpenuhi Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah yang seharusnya terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dikali 100%	Adanya sarana prasarana kedinasan Kepala Daerah yang harus dipenuhi	- Adanya perubahan kebutuhan sarana prasarana kedinasan yang tidak sesuai dengan rencana sebelumnya dan adanya efisiensi anggaran - Adanya perubahan	- Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan dan OPD terkait serta melaksanakan perubahan anggaran - Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan yang berlaku dan

					peraturan pengadaan barang/jasa - Adanya perubahan kebijakan	koordinasi dengan Bagian PBJ - Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan
23	Terlaksananya pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Daerah	Jumlah Kegiatan Kedinasan Pimpian Daerah yang Terfasilitasi dibagi Jumlah Hari Efektif dikali 100%	Terpenuhinya SDM Bagian Prokompim	Banyaknya kegiatan pimpinan, adanya kegiatan yang harus dilaksanakan di luar agenda pimpinan, perubahan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang mendadak	Mengkomunikasikan kegiatan pimpinan yang akan dilaksanakan dengan skala prioritas
24	Meningkatnya pengelolaan organisasi dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh KemenpanRB dengan 7 komponen yaitu: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Konsultasi dan Pengaduan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Inovasi dan Pertanyaan Tambahan	Kelengkapan dari sarana dan prasarana yang ada di unit pelayanan	Belum semua sarpras terkait pelayanan yang dibutuhkan, tersedia	Dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan pada unit pelayanan yang akan dilakukan penilaian pada tahun berjalan
25		Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah dokumen peraturan bupati tentang SOTK perangkat daerah dan dokumen evaluasi kelembagaan (kematangan organisasi daerah) serta sk analisis jabatan dan analisis beban kerja yang tersusun	adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang sotk, tugas dan fungsi, anjab dan abk	skoring bidang-bidang perangkat daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena mengacu kepada PP 18 tahun 2016, dan ketika menyusun peraturan bupati proses harmonisasi yang cukup lama	dillakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap perangkat daerah mengenai sotk, tugas dan fungsi, kematangan organisasi daerah serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI

IKK sesuai RPJMD 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjut
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif/Jumlah seluruh pengadaan	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

			Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD		
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan/Total belanja modal dan operasional	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku
3	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah daerah	Jumlah niai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1/Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakukan verifikasi RUP PBJ	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

IKK sesuai Kepmendagri no 100.2.7-109 TAHUN 2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	RekomendasiTindaklanjut
1	Pemanfaatan SistemPengadaan	Jumlah Bobot nilai anggaran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP) DITAMBAH Bobot RUP melalui Penyedia yang diumumkan dalam SIRUP (nilai RUP Penyedia) DITAMBAH Bobot RUP TP (e-Tender e-Purchasing) DITAMBAH Bobot	- Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun	- Kinerja PD belum memenuhi dateline pengajuan Berita Acara Verifikasi RUP PBJ - Kinerja OPD belum melaksanakan pencatatan	Memastikan proses perencanaan PBJ dari Perangkat Daerah sudah sesuai dengan prinsip PBJ dan peraturan yang berlaku

		realisasi TP (e-Tender e-Purchasing) DITAMBAH Bobot realisasi pengadaan langsung DITAMBAH Bobot realisasi Penunjukan Langsung DITAMBAH Bobot realisasi pengadaan	Anggaran 2026 - Pelaksanaan Desk Verifikasi Penginputan Rencana Umum Pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung pada saat Penetapan dan Perubahan APBD	non-tender atas pelaksanaan pengadaan PL dibawah 100 juta - Perubahan RUP dari PD setelah dilakuka nverifikasi RUP PBJ	
2	Kualifikasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Keterisian formasi JF PPBJ/Personel lainnya dibandingkan dengan kebutuhan DITAMBAH Jumlah penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya sebagai Pokja pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan/atau PPK DITAMBAH Rencana aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Pelaksanaan Pendampingan (Bimbingan Teknis) terkait Market Sounding dan Market Confirmation Bagi Pelaku PBJ serta Pendampingan MOOC untuk Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1	Rendahnya keterlibatan pimpinan Pememerintah Daerah dan masih terbatasnya pemahaman terhadap pentingnya penyusunan rencana aksi sebagai strategi pemenuhan SDM PBJ	Pelaksanaan Pendampingan (Bimbingan Teknis) terkait Market Sounding dan Market Confirmation Bagi Pelaku PBJ serta Pendampingan MOOC untuk Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1
3	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Bobot Pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ	Membuat Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor: 442.1/32 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026	Belum terbukanya level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah seperti level 4 Strategis dan 5 Unggul yang dapat menghambat peningkatan tata kelola pengadaan secara keseluruhan	Aktif mengikuti perkembangan dan proses persiapan pembukaan level kematangan UKPBJ yang lebih tinggi (Strategis) dari LKPP RI

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun di satu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Sekretariat Daerah dari 35 indikator terdapat 5 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

Indikator Sasaran :

1) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Hal ini disebabkan nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2026 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri.
2) Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Hal ini disebabkan Data web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum ditetapkan dan masih menggunakan data tahun 2024.

Indikator Program :

1) Indeks Zakat Nasional Hal ini disebabkanPerda Pengelolaan Zakat belum disosialisasikan dan dukungan APBD Tahun 2025 belum ada
2) Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu Hal ini disebabkan pelaporan kegiatan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang tepat waktu melalui aplikasi Simpelbangda dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 100%, pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 95,15% dan di tahun 2026 ini yaitu sebesar 98,4%
3) Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi Hal ini disebabkan capaian pupuk tidak dapat tercapai sebesar 25% dikarenakan realisasi tanam untuk tanaman pangan lebih rendah dari rencana kebutuhan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, antara lain :
   1) Keterbatasan anggaran (efisiensi anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan
   2) Kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah
   3) Perubahan kebijakan yang dinamis
   4) Adanya perubahan kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan mendadak yang harus dilaksanakan diluar rencana.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional antara lain:
   1) Adanya koordinasi dan pelayananyang baik akan memudahkan pencapaianvisi dan misi kepala daerah maupun pencapaian program nasional.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah, antara lain :
    1) Memaksimalkan kegiatan dengan anggaran yang tersedia
    2) Meningkatkan kemampuan SDM
    3) Meningkatkan koordinasi Internal dan eksternal
    4) Meningkatkanpelayanan Sekretariat Daerah

5) Formulasi isu-isu penting

    1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
    2) Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
    3) Meningkatkan Pelayanan Publik
    4) Penguatan Koordinasi dan Kerjasama

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Kamus usulan kegiatan merupakan kelompok usulan permasalahan yang disusun dalam SIPD yang sudah disesuaikan dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerahdan Program Perangkat Daerah (Program prioritas yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029). Tujuan penyusunan Kamus kegiatan adalah untuk memastikan agarusulan kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Verifikasi yang dilakukan mulai dari User secretariat DPRD sampai dengan user Perangkat daerah adalah untuk memastikan kembali bahwa usulan permasalahan/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD telah sesuai dengan Bidang Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Program Perangkat Daerah. Secara rinci rumusan Kamus kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Telaah Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025

BIDANGURUSAN	URAIAN PERMASALAHAN	OPDTUJUAN	PROGRAM
Sekretariat Daerah			
	Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana rumah ibadah	Bagian Kesejahteraan dan Bina Mental	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sumber: Bagian Kesra dan Bina Mental Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

Jumlah pokok pikiran DPRD yang disetujui 193 pokir. Dari 200 usulan, berdasarkan hasil verlap terdapat 7 usulan yang ditolak dengan alasan :

1. Belum punya surat keterangan terdaftar
2. Tercatat 2 kali
3. Dibangun di rumah pribadi

2.5. *Review* terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat usulan penambahan anggaran pada Bagian Hukum dari pagu indikatif Rp 456.000.000 menjadi Rp 806.000.000 untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan 2 (dua) unit Laptop dan persediaan penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi (pilkades serentak) dan Pengadaan server, anjungan, dan 1 (satu) unit Komputer dalam rangka menunjang pengelolaan JDIH Kabupaten Temanggung.
2. Usulan penambahan anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dari pagu indikatif Rp 23.695.050,- menjadi Rp 123. 695.050,- untuk Peningkatan SDM dan Integritas PBJ guna mendukung Indeks Tata Kelola PBJ, Pengadaan 5 (lima) unit personal komputer dan 1 (satu) unit Laptop untuk mendukung kinerja SDM PBJ dalam pelayanan OPD dan pelayanan publik pada proses e-Procurement (e-Tendering, e-PL dan e-Purchasing) dengan rata-rata 6.000 (enam ribu) paket per tahun, dan Pelaksanaan sosialisasi Clearing House PBJ.
3. Usulan penambahan anggaran pada Bagian Umum dari pagu indikatif Rp 26.017.476.869,- menjadi Rp 26.438.446.932,- untuk Jamuan Makan Minum Tamu Pimpinan Daerah dan kegiatan Nasional, Kebutuhan Mebel dan AC rumah dinas, serta sarana prasarana kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara, Peringatan hari Nasional dan Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.7.

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2027

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Sekretariat Daerah													
1	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)**	TMG	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	%	**112.500.000**	1	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Pemerintahan)**	TMG	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	100	%	**112.500.000**	
			Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%					Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	100	%		
	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%	103.500.000		Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	%	103.500.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	%	9.000.000		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	%	9.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
2	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)**	**TMG**	**Persentase produk hukum yang difasilitasi**	**100**	**%**	**456.000.000**	**2**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Hukum)**	**TMG**	**Persentase produk hukum yang difasilitasi**	**100**	**%**	**806.000.000**	
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	**100**	**%**					**Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH**	**100**	**%**		
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	**100**	**%**					**Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi**	**100**	**%**		
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	**100**	**%**					**Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi**	**100**	**%**		
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	**100**	**%**					**Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin**	**100**	**%**		
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan	100	%	456.000.000		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, Pendokumentasian Produk Hukum dan	100	%	806.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pengelolaan Informasi Hukum							Pengelolaan Informasi Hukum				
3	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental)**		**Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi**	**80**	**%**	**1.492.775.350**	**3**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesra dan Bina Mental)**		**Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi**	**80**	**%**	**1.492.775.350**	
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	**88**	**%**					**Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik**	**88**	**%**		
			Indeks Zakat Nasional	**0,81**	**poin**					**Indeks Zakat Nasional**	**0,81**	**poin**		
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	%	1.492.775.350		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	100	%	1.492.775.350	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4	**Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian)**	TMG	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	**526.250.000**	4	**Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Perekonomian)**	TMG	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	100	%	**526.250.000**	
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%					Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	100	%		
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%					Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	83,33	%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Pengendalian Inflasi Daerah	100	%	76.250.000		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, Pengendalian Inflasi Daerah	100	%	76.250.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	100	%	450.000.000		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Persentase terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	100	%	450.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan							Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				
5	**Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan)**		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	**34.151.700**	5	**Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Pembangunan)**		Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	100	%	**34.151.700**	
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%					Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	100	%		
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%					Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	100	%		
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	%	34.151.700		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	%	34.151.700	
6	**Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)**	TMG	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%	**23.695.050**	6	***Program Perekonomian dan Pembangunan (Bagian PBJ)***	TMG	Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	100	%	**123.695.050**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	95	%					Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	95	%		
			Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%					Presentase Pendampingan proses PBJ	100	%		
	Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	100	%	23.695.050		Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa		Presentase terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa	100	%	123.695.050	
7	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi)**	TMG	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	%	**79.343.750**	7	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Organisasi)**	TMG	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	100	%	**79.343.750**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,8	Angka					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,8	Angka		
	Penataan Organisasi		Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	79.343.750		Penataan Organisasi		Persentase terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100	%	79.343.750	
8	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian**	TMG	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	76	Angka	**25.519.476.869**	8	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian**	TMG	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	76	Angka	**25.519.476.869**	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Umum)							**Umum)**						
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%					Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100	%		
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%					Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	100	%		
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	13	Laporan	15.422.665.709		Administrasi keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	13	Laporan	15.422.665.709	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	25	Dokumen	1.500.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah yang tersedia	25	Dokumen	1.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	%			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada	100	%	2.193.400.000		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada	100	%	2.193.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%		

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4.159.438.595		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Pengadaan Kendaraan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	4.159.438.595	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa	100	%	1.763.905.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa	100	%	1.763.905.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah,	100	%	1.959.029.937		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah,	100	%	1.959.029.937	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah pada Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	100	%	517.537.628		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase capaian indikator Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan	100	%	517.537.628	

RANCANGAN AWAL RKPD 2027							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Pagu Indikatif**	**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program/ Kegiatan**	**Target Kinerja**	**Satuan**	**Kebutuhan Dana**	**Keterangan**
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Wakil Kepala Daerah							Wakil Kepala Daerah				
9	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Prokompim)**		**Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah**	**100**	**%**	**2.231.558.963**	9	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Prokompim)**		**Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah**	**100**	**%**	**2.231.558.963**	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera		Persentase terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	600.000.000		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera		Persentase terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	600.000.000	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%	1.631.558.963		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan, Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	%	1.631.558.963	

Sumber : [PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Temanggung, 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi perangkat daerah dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2023-2026

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	RABA HUKUM JDIH (Ragam Akses Braille Hukum JDIH)	Bagian Hukum	APBD	Penyediaan produk hukum dalam huruf braille (pengalih hurufan produk hukum daerah ke dalam huruf braille)	Produk Hukum Daerah dengan Huruf Braille	Meningkatnya aksesibilitas terhadap informasi hukum bagi penyandang disabilitasi terutama bagi disabilitas netra, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif	Bagian Hukum - 2025

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung, 2026

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Sekretariat Daerahlebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan Sekretariat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah 2025-2029 adalah "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien" dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel
2. Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum
3. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual
4. Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
5. Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2027 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat Daerah Kab. Temanggung pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2027	TARGET KONDISI AKHIR 2029
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien			Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	67	69
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	68,5	70,5
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	Angka	3,47	3,49
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Pemerintahan)	Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	%	100	100
			Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	%	100	100
	Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi pelayanan hukum		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Angka	97,18	97,38
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Hukum)	Persentase produk hukum yang difasilitasi	%	100	100
			Persentase dokumentasi perundangan melalui JDIH	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi	%	100	100
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi	%	100	100
			Persentase pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin	%	100	100

	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang bina mental spiritual		Persentase rumusan bahan naskah kebijakan yang menjadi kebijakan penguatan dan pengelolaan bina mental spiritual	%	100	100
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (Bagian Kesra dan Bina Mental)	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	%	80	80
			Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	%	89	91
			Indeks Zakat Nasional	Poin	0,82	0,83
	Meningkatnya Kebijakan Bidang Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang terfasilitasi	%	100	100
			Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Angka	3,97	4,05
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Perekonomian)	Persentase ketersediaan produk barang bersubsidi	%	100	100
			Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	%	100	100
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	83,33	83,33
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Pembangunan)	Persentase capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100
			Persentase dokumen kontrak yang diverifikasi	%	100	100
			Persentase pelaporan kegiatan PD/Unit kerja tepat waktu	%	100	100
	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (Bagian Pengadaan Barang/Jasa)	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	Angka	84,55	84,65

			Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	%	100	100
			Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	100	100
			Presentase Pendampingan proses PBJ	%	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	76,25	76,75
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Organisasi)	Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	%	100	100
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka	3,9	4
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Angka	76,2 5	76,75
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sekretariat Daerah		IKM Sekretariat Daerah	Angka	81,5	82
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Umum)	Persentaseketersediaanadministrasikeuangan, umum dan jasapenunjangperangkatdaerah	%	100	100
			Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	%	100	100

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung di Tahun 2027 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- Total kebutuhan dana/paguindikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027

Bagian Pemerintahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Pemerintahan						112.500.000,00								227.724.393,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						112.500.000,00								227.724.393,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						112.500.000,00								227.724.393,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						112.500.000,00								227.724.393,00	
			Persentase administrasi tata kelola pemerintahan yang baik	-		-	100 %	93.500.000,00							-	211.217.766,00	

							persentase kerja sama yang ditindaklanjuti	-		-	100 %	19.000.000,00							-	16.506.627,00	
	4.01.02.2.01					Administrasi Tata Pemerintahan						93.500.000,00						-		211.217.766,00	
						-						93.500.000,00						-		211.217.766,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	-	77.000.000,00							-	180.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	-	7.500.000,00							-	15.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	-	9.000.000,00							-	16.217.766,00	

	4.01.02.2.01.00001					Penataan Administrasi Pemerintahan						7.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			15.000.000,00	
						Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-		-	12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0000					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						9.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			16.217.766,00	

	2																			
						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-		-	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.217.766,00	Bagian Pemerintahan
	4.01.02.2.01.0003					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						77.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			180.000.000,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-		-	6 Dokumen	77.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	180.000.000,00	Bagian Pemerintahan
	4.01					Fasilitasi Kerja Sama Daerah						19.000.000,00						-		16.506.627,00	

	.02.2.04																			
						-						19.000.000,00						-		16.506.627,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	-	19.000.000,00							-	16.506.627,00	
	4.01.02.2.04.0001					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						19.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			16.506.627,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-		-	12 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	16.506.627,00	Bagian Pemerintahan
	J U M L A H											112.500.000,00								227.724.393,00	

Bagian Hukum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Hukum						456.000.000,00								924.149.538,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						456.000.000,00								924.149.538,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						456.000.000,00								924.149.538,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						456.000.000,00								924.149.538,00	
			Persentase produk hukum yang difasilitasi	-		-	100 %	456.000.000,00							-	924.149.538,00	
	4.	Fasilitasi dan Koordinasi						456.000.000,00						-		924.149.538,00	

	01.02.2.03					Hukum														
						-						456.000.000,00						-		924.149.538,00	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	-	416.000.000,00							-	844.149.538,00	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	-	25.000.000,00							-	50.000.000,00	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	-	15.000.000,00							-	30.000.000,00	
	4.01.02.2.03.					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						25.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			50.000.000,00	

	0001																			
						Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-		-	100 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Bagian Hukum
	4.01.02.2.03.0002					Fasilitasi Bantuan Hukum						416.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			844.149.538,00	
						Terlaksanannya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-		-	30 Kasus	416.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	844.149.538,00	Bagian Hukum

	4.01.02.2.03.00003					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnyap eningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			30.000.000,00	
						Terlaksanaanya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-		-	100 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	30.000.000,00	Bagian Hukum
	J U M L A H											456.000.000,00								924.149.538,00	

Bagian Kesra dan Bina Mental

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental						13.575.375.350,00								13.909.660.350,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						13.575.375.350,00								13.909.660.350,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						13.575.375.350,00								13.909.660.350,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						13.575.375.350,00								13.909.660.350,00	
			Indeks Zakat Nasional (IZN)	-		-	0,82 angka	13.575.375.350,00							-	13.909.660.350,00	
			Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi	-		-	80 %	13.575.375.350,00							-	13.909.660.350,00	

							Persentase rumah ibadah dan sarpras pendidikan keagamaan kondisi baik	-		-	89 %	13.575.375.350,00							-	13.909.660.350,00	
	4.01.02.2.02					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						13.575.375.350,00							-	13.909.660.350,00	
						-						13.575.375.350,00							-	13.909.660.350,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	-	200.000.000,00							-	250.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan,	-		-	-	1.259.660.350,00							-	1.259.660.350,00	

							TrantibumLinmas												
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-		-	-	12.115.715.000,00							-	12.400.000.000,00	
	4.01.02					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						200.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhm			250.000.000,00	

	.2.02.0001													serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		asyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya				
						Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-		-	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental
	4.01.02.2.02.0002					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						12.115.715.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			12.400.000.000,00	

						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, AdministrasiKependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PengendalianPenduduk dan KB	-		-	1 Dokumen	12.115.715.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	12.400.000.000,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental
	4.01.02.2.02.00					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						1.259.660.350,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.259.660.350,00	

	03													narkoba, judi, dan penyeludupan.						
						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, TrantibumLinmas	-		-	1 Dokumen	1.259.660.350,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.259.660.350,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bina mental
	J U M L A H									13.575.375.350,00								13.909.660.350,00		

Bagian Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Pembangunan						34.151.700,00								69.737.587,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						34.151.700,00								69.737.587,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						34.151.700,00								69.737.587,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						34.151.700,00			p					69.737.587,00	
			Presentase dokumen kontrak yang diverifikasi	-		-	100 %	34.151.700,00							-	69.737.587,00	
	4.01.0	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						34.151.700,00						-		69.737.587,00	

	3.2.02																			
						-						34.151.700,00						-		69.737.587,00
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	-	10.348.000,00							-	21.250.000,00
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	-	23.803.700,00							-	48.487.587,00
	4.01.03.2.02.0001					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						10.348.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			21.250.000,00	

						Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-		-	1 Dokumen	10.348.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	21.250.000,00	Bagian Pembangunan
	4.01.03.2.02.00002					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						23.803.700,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			48.487.587,00	
						Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-		-	4 Laporan	23.803.700,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	48.487.587,00	Bagian Pembangunan
	J U M L A H											34.151.700,00								69.737.587,00	

Bagian Perekonomian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Perekonomian						526.250.000,00								154.488.984,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						526.250.000,00								154.488.984,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						526.250.000,00								154.488.984,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						526.250.000,00								154.488.984,00	
			Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	-		-	83,33 %	76.250.000,00							-	154.488.984,00	
			Persentase Capaian Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	-		-	100 %	450.000.000,00							-	0,00	

							Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang terkoordinasi dengan baik													
							Persentase laporan permasalahan barang bersubsidi yang terselesaikan	-		-	100 %	76.250.000,00							-	154.488.984,00	
	4.01.03.2.01					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						76.250.000,00						-		154.488.984,00	
						-						76.250.000,00						-		154.488.984,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	-	50.000.000,00							-	101.327.244,00	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	-		-	-	26.250.000,00							-	53.161.740,00	

							dan Distribusi Perekonomian												
	4.01.03.2.01.00001					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						50.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik			101.327.244,00	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-		-	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	101.327.244,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						26.250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna			53.161.740,00	

	.01.00002													korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik					
						Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-		-	2 Laporan	26.250.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	53.161.740,00	Bagian Perekonomian
	4.01.03.2.04					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						450.000.000,00						-		0,00	
						-						450.000.000,00						-		0,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,	-		-	-	450.000.000,00							-	0,00	

							Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja												
	4.01.03.2.04.00001					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						450.000.000,00			5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	-			0,00	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,	-		-	5 Dokumen	450.000.000,00	Kab. Temanggung	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					-	0,00	Bagian Perekonomian

						Modal, Tenaga Kerja	Penanaman Modal, Tenaga Kerja													
	J U M L A H											526.250.000 ,00							154.488.984 ,00	

Bagian PBJ

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						23.695.050,00								47.885.164,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						23.695.050,00								47.885.164,00	
	4.01					SEKRETARIAT DAERAH						23.695.050,00								47.885.164,00	
1.	4.01.03					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						23.695.050,00								47.885.164,00	

							Persentase Kegiatan Perangkat Daerah yang melakukan pencatatan non tender atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa	-		-	1 Dokumen	23.695.050,00							-	47.885.164,00	
							Presentase Nilai Pagu Barang jasa yang terumumkan	-		-	100 %	23.695.050,00							-	47.885.164,00	
							Presentase Pendampingan proses PBJ	-		-	103 OPD	23.695.050,00							-	47.885.164,00	
	4.01.03.2.03					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						23.695.050,00						-		47.885.164,00	
						-						23.695.050,00						-		47.885.164,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	-	15.000.000,00							-	27.885.164,00	

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	5.500.000,00							-	15.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	-	3.195.050,00							-	5.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						5.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			15.000.000,00	
						Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

	4.01.03.2.03.0002					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						15.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			27.885.164,00	
						Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-		-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	27.885.164,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.03.2.03.0000					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						3.195.050,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			5.000.000,00	

	3																			
						Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-		-	103 Orang	3.195.050,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	5.000.000,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	J U M L A H											23.695.050,00								47.885.164,00	

Bagian Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Organisasi						79.343.750,00								150.656.162,44	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						79.343.750,00								150.656.162,44	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						79.343.750,00								150.656.162,44	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						79.343.750,00								150.656.162,44	
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-		-	3,9 Angka	79.343.750,00							-	150.656.162,44	
			Persentase Fasilitasi Penyusunan Dokumen Kelembagaan dan Analisis jabatan	-		-	100 %	79.343.750,00							-	150.656.162,44	

	4.01.01.2.13					Penataan Organisasi						79.343.750,00						-		150.656.162,44	
						-						79.343.750,00						-		150.656.162,44	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	-	29.343.750,00							-	39.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	-	20.000.000,00							-	22.000.000,44	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	-	0,00							-	18.656.162,00	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan	-		-	-	30.000.000,00							-	71.000.000,00	

							Publik dan Tata Laksana												
	4.01.01.2.13.00001					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						20.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruhmasyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			22.000.000,44	
						Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-		-	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	22.000.000,44	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.1					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						30.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan			71.000.000,00	

	3.0002													pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		dan aktivitasnya					
						Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	71.000.000,00	Bagian Organisasi
	4.01.01.2.13.0003					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnyapeningkatan rasa amanbagi seluruhmasyarakat dalammenjalankan kehidupan dan aktivitasnya			18.656.162,00	
						Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		-	2 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	-					-	18.656.162,00	Bagian Organisasi

	4.01.01.2.13.00005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						29.343.750,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasankorupsi, narkoba, judi, dan penyeluduppan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			39.000.000,00	
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-		-	2 Dokumen	29.343.750,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	39.000.000,00	Bagian Organisasi
	J U M L A H											79.343.750,00								150.656.162,44	

Bagian Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		Bagian Umum						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	
			akip	-		-	10 0	1.500.000,00							-	1.000.000,00	
			Nilai AKIP Sekretariat Daerah	-		-	76.25 angka	23.776.576.869,00							-	25.201.080.309,00	
			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang	-		-	100 %	8.069.243.595,00							-	8.999.330.222,00	

							perangkat daerah												
							Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 %	15.424.165.709,00							-	15.423.665.709,00	
							Persentase pemenuhan kebutuhan kedinasan Pimpinan Daerah	-		-	100 %	2.476.567.565,00							-	3.215.084.378,00	
	4.01.01.2.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000,00						-		4.000.000,00	
						-						1.500.000,00						-		4.000.000,00	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	

							Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	1.500.000,00							-	1.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
							Jumlah Laporan pEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	0,00							-	1.000.000,00	
	4.01.01.2.01.					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagiseluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	

	0001																			
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	25 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01.0004					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	-					-	1.000.000,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.01.00005					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.01					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.000.000,00	

	.0007																				
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	15 Laporan	0,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.422.665.709,00						-		15.422.665.709,00	
						-						15.422.665.709,00						-		15.422.665.709,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	15.422.665.709,00							-	15.422.665.709,00	

	4.01.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.422.665.709,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			15.422.665.709,00	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	135 Orang /bulan	15.422.665.709,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	15.422.665.709,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.193.400.000,00						-		2.537.000.000,00	
						-						2.193.400.000,00						-		2.537.000.000,00	

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	38.000.000,00							-	40.000.000,00	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	1.300.000.000,00							-	1.500.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	380.000.000,00							-	500.000.000,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	264.500.000,00							-	275.000.000,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	95.000.000,00							-	100.000.000,00	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	115.900.000,00							-	122.000.000,00	

	4.01.01.2.06.00001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						95.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			100.000.000,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	95.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						115.900.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			122.000.000,00	

	002																			
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	115.900.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	122.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor						264.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagiseluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			275.000.000,00	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	264.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	275.000.000,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.06.00006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						38.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			40.000.000,00	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	38.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.					Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.500.000.000,00	

	0008																			
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	1.300.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.500.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.06.00009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						380.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			500.000.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	380.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	500.000.000,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4.159.438.595,00						-		4.159.938.595,00	
						-						4.159.438.595,00						-		4.159.938.595,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.094.868.750,00							-	1.094.868.750,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	3.055.069.845,00							-	3.055.069.845,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	9.500.000,00							-	10.000.000,00	

	4.01.01.2.08.00001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			10.000.000,00	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	9.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	10.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.00002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.094.868.750,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.094.868.750,00	

						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.094.868.750,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.094.868.750,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.055.069.845,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			3.055.069.845,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.055.069.845,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	3.055.069.845,00	Bagian Umum
	4.01.					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.763.905.000,00						-		2.402.391.627,00	

	01.2.09					Daerah													
						-						1.763.905.000,00						-		2.402.391.627,00	
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	18.905.000,00							-	19.900.000,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	700.000.000,00							-	1.232.491.627,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	712.500.000,00							-	750.000.000,00	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	-		-	-	237.500.000,00							-	250.000.000,00	

							Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya												
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	47.500.000,00						-	50.000.000,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	47.500.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						237.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			250.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	-		-	9 Unit	237.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	250.000.000,00	Bagian Umum

							Pajaknya													
	4.01.01.2.09.00002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						712.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			750.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	27 Unit	712.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	750.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.0					Pemeliharaan Mebel						47.500.000,00			-	-	Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas			50.000.000,00	

	1.2.09.0005														antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik					
						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	50 Unit	47.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	50.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.500.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			100.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	47.500.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	100.000.000,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.09.0007					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						18.905.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			19.900.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	18.905.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	19.900.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						700.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.232.491.627,00	

						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	6 Unit	700.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.232.491.627,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						517.537.628,00						-		517.537.628,00	
						-						517.537.628,00						-		517.537.628,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	177.537.628,00							-	177.537.628,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	-	40.000.000,00							-	40.000.000,00	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	300.000.000,00							-	300.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						177.537.628,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			177.537.628,00	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang /Bulan	177.537.628,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	177.537.628,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.11.0002					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						300.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			300.000.000,00	
						Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	50 Paket	300.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	300.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.11.					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						40.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			40.000.000,00	

	0003																			
						Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	2 Orang	40.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	40.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.959.029.937,00						-		2.697.546.750,00	
						-						1.959.029.937,00						-		2.697.546.750,00	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	600.000.000,00							-	480.000.000,00	

							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	-	879.029.937,00							-	1.857.546.750,00	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	-	480.000.000,00							-	360.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			480.000.000,00	
						Tersedianya Kebutuhan Rumah TanggaKepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	600.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	480.000.000,00	Bagian Umum

	4.01.01.2.12.0002					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						480.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			360.000.000,00	
						Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	480.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	360.000.000,00	Bagian Umum
	4.01.01.2.12.00					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						879.029.937,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			1.857.546.750,00	

	03																			
						Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-		-	12 Paket	879.029.937,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	1.857.546.750,00	Bagian Umum
	J U M L A H											26.017.476.869,00								27.741.080.309,00	

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	PROVINSI	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	

	4.01					SEKRETARIAT DAERAH						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	
1.	4.01.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.570.457.500,00								2.329.217.611,00	
							Persentase pemenuhan Pelayanan kedinasan Pimpinan Daerah	-		-	100 %	2.570.457.500,00							-	2.329.217.611,00	
	4.01.01.2.11					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00						-		600.000.000,00	
						-						600.000.000,00						-		600.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan	-		-	-	600.000.000,00							-	600.000.000,00	

							Wakil Kepala Daerah													
	4.01.01.2.11.00004					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			600.000.000,00	
						Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		-	192 Orang/ Bulan	600.000.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	600.000.000,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1.970.457.500,00						-		1.729.217.611,00	

	2.14																			
						-						1.970.457.500,00						-		1.729.217.611,00
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	-	455.384.500,00							-	479.952.533,00
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	-	1.127.250.000,00							-	891.130.107,00
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	-	387.823.000,00							-	358.134.971,00
	4.01.01.2.14.0001					Fasilitasi Keprotokolan						455.384.500,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			479.952.533,00	

						Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		-	500 Laporan	455.384.500,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	479.952.533,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14.00002					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.127.250.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			891.130.107,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		-	2000 Laporan	1.127.250.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	891.130.107,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	4.01.01.2.14					Pendokumentasian Tugas Pimpinan						387.823.000,00			7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, sertamemperkuatpencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Terwujudnya peningkatan rasa aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya			358.134.971,00	

	.0003																			
						Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		-	800 Laporan	387.823.000,00	Kab. Temanggung	Dana Alokasi Umum (DAU)					-	358.134.971,00	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	J U M L A H										2.570.457.500								2.329.217.611	

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Temangung di Tahun 2027 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2027 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2027 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi meliputi penambahan pada Bagian Kesra dan Bina Mental sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (pokir) sebesar Rp 12.082.600.000,-serta Bagian Umum pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah sebesar Rp 300.000.000,- dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah sebesar Rp 198.000.000,-. Sehingga pagu indikatif semula Rp 30.475.751.682,- menjadi Rp 43.056.351.682,-.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2027

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2027				RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2027				(+ / -)
No	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**		**No**	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan**	**Pagu Indikatif**		**Pagu Indikatif**
	Sekretariat Daerah				**Sekretariat Daerah**			
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**112.500.000**		**1**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**112.500.000**		**0**
	Administrasi Tata Pemerintahan	**103.500.000**			**Administrasi Tata Pemerintahan**	**93.500.000**		**0**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	9.000.000			Penataan Administrasi Pemerintahan	7.500.000		0
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7.500.000			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9.000.000		0
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	87.000.000			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	77.000.000		0
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**9.000.000**			**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**19.000.000**		0
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.000.000			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	19.000.000		0
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**456.000.000**		**2**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**456.000.000**		**0**
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**456.000.000**			**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**456.000.000**		**0**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	25.000.000			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	25.000.000		0
	Fasilitasi Bantuan Hukum	416.000.000			Fasilitasi Bantuan Hukum	416.000.000		0
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	15.000.000		0
3	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**1.492.775.350**		**3**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**13.575.375.350**		**12.082.600.000**
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**1.492.775.350**			**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**13.575.375.350**		**12.082.600.000**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	200.000.000		0
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	33.115.000			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	12.115.715.000		0

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.259.660.350			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.259.660.350		0
4	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**526.250.000**		**4**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**526.250.000**		0
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**76.250.000**			**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**76.250.000**		0
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000		0
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26.250.000			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	26,250,000		0
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**450.000.000**			**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**450.000.000**		0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	450.000.000			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	450.000.000		0
5	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**34.151.700**		**5**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**34.151.700**		0
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**34.151.700**			**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**34.151.700**		0
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10.348.000			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	10.348.000		0
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	23.803.700			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	23.803.700		0
6	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**23.695.050**		**6**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**23.695.050**		**0**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**23.695.050**			**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**23.695.050**		**0**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.500.000		0
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.000.000			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.000.000		0
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.195.050			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.195.050		0
7	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**79.343.750**		**7**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**79.343.750**		**0**
	Penataan Organisasi	**79.343.750**			**Penataan Organisasi**	**79.343.750**		**0**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	20.000.000		0
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	30.000.000		0
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-		0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	293.43.750			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29.343.750		0

8	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.231.558.963**		**8**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.570.457.500**	**338.898.537**
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**600.000.000**			**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**600.000.000**	**0**
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	0
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**1.631.558.963**			**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**1.970.457.500**	**338.898.537**
	Fasilitasi Keprotokolan	355.359.500			Fasilitasi Keprotokolan	455,384,500	100.025.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.067.250.000			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.127,250,000	60.000.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	208.949.463			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	387,823,000	178.873.537
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**25.519.476.869**		**9**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**26.017.476.869**	**498.000.000**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**1.500.000**			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.500.000**	**0**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**15.422.665.709**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.422.665.709**	**0**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.422.665.709			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.422.665.709	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.193.400.000**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.193.400.000**	**0**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.900.000			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.900.000	**0**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.500.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	264.500.000	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.300.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		0

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			**0**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			**0**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4.159.438.595**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.159.438.595**		**0**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000		0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.868.750		**0**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.055.069.845			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.055.069.845		0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.763.905.000**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.763.905.000**		**0**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.500.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.500.000		0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.500.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	712.500.000		0
	Pemeliharaan Mebel	47.500.000			Pemeliharaan Mebel	47.500.000		0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.500.000		0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.905.000			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.905.000		0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	700.000.000		0
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**517.537.628**			**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**517.537.628**		**0**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.537.628			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	177.537.628		0
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300.000.000		0
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40.000.000		0
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**1.461.029.937**			**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**1.959.029.937**		**498.000.000**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	300.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	600.000.000		300.000.000

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	282.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	480.000.000		198.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	879.029.937			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	879.029.937		0
JUMLAH		**30.475.751.682**		**JUMLAH**		**43.395.250.219**		**12.919.498.537**

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temangung Tahun 2027

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2027 sebesar Rp12.919.498.537,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Bagian Kesra dan Bina Mental sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (pokir) sebesar Rp 12.082.600.000,- serta

Bagian Umum pada sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (RTB) sebesar Rp 300.000.000,- dan Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (RTWB) sebesar Rp 198.000.000,-.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar Rp 100.025.000,- sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp 60.000.000,- dan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebesar Rp 178.873.537,-

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasionalnya. IKU menjadi prioritas utama untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun evaluasi hasil renja 2025 dan target IKU tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET TAHUN 2027	KETERANGAN
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
29	**Sekretariat Daerah**				
1	Indeks Kualitas Kebijakan	angka	75,71	67	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Pemda)	angka	67,37	68,5	
3	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	angka	3,298	3,47	nilai EPPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan 2026 masih menggunakan nilai EPPD Tahun 2024 dikarenakan nilai EPPD Tahun 2025 sampai pada Maret 2026 belum dilakukan perhitungan penilaian oleh Kemendagri
4	Indeks Reformasi Hukum	angka	97,12	97,18	
5	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental dan Spiritual	%	100	100	
6	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terfasilitasi	%	100	100	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	angka	3,82	3,97	
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	angka	84,35	86	
9	Persentase AKIP Perangkat Daerah berpredikat BB	%	84,78	76,25	
10	IKM Sekretariat Daerah	angka	86,22	81,5	

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja program pada tingkat pemerintah pusat atau daerah. Indikator ini merupakan ukuran kinerja yang paling strategis, kritis, dan mewakili esensi dari suatu program sehingga dapat mencerminkan apakah program tersebut berjalan efektif. Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PENUNJANG								
	Pengadaan	7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Paket	3066	80%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Jumlah seluruh pengadaan		6472		
		8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan	Rupiah	437,54 M	31%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Total belanja modal dan operasional		622,68 M		DJPK Kemenkeu
		9	Peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasapemerintahdaerah	Jumlah niai PBJ yang menggunakan Produk dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun n - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi tahun n-1	Rupiah	225,5 M	15%	Data Inaproc Bagian PBJ
				Jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi n-1		125,8 M		Data Inaproc Bagian PBJ

NO	URUSAN	NO. IKK	IKK HASIL	RUMUS/PERSAMAAN	SATUAN	EVALUASI HASIL RENJA 2025 (realisasi)	TARGET 2027	SUMBER DATA
URUSAN PENUNJANG								
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	7	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Jumlah Bobot Pengumuman RUP, RUP Penyedia, RUP e-Tendering+e-Purchasing, Realisasi e-Tendering + e-Purchasing (TP), Realisasi Pengadaan Langsung Transaksional (pl), Realisasi Penunjukan Langsung Transaksional (PL), dan Realisasi Digitalisasi PBJ	Bobot	n.a	22	Bagian PBJ
		8	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Jumlah Bobot Keterisian formasi JF PPBJ/Personel Lainnya, Penugasan JF PPBJ/Personel Lainnya, dan Penyusunan Rencana Aksi pemenuhan JF PPBJ (Personel Lainnya bersertifikat kompetensi) dan PPK bersertifikat kompetensi	Bobot	n.a	24	Bagian PBJ
		9	Tingkat Kematangan UKPBJ	Bobot Tingkat Kematangan UKPBJ	Bobot	n.a	24	Bagian PBJ

BAB VI
PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2027 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat Daerah untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat Daerah itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2027. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2027 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung didukung dengan anggaran sebesar Rp. 58.982.319.434,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.171.083.110,- (95,23 %) terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 55.151.333.111,- dan Belanja Modal sebesar Rp 1.019.749.999,-sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.811.236.324,- (5%). Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi efisiensi sebesar 4,22% (selisih capaian kinerja sebesar 99,22 % dengan realisasi anggaran 95%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan Tahun Anggaran 2026 didukung anggaran sebesar Rp 59.686.362.517,-dengan realisasi sampai dengan Triwulan I sebesar Rp 6.234.009.485,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar 10%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2027 Sekretariat Daerah mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 43.395.250.219,- yang terdiri dari 3 (tiga) program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2027 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

TRI WINARNO, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731020 199903 1 005